

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

*Debt-book Diplomacy* adalah suatu istilah yang diungkapkan pertama kalinya oleh Sam Parker dan Gabrielle Chefitz pada 2018 yang mendeskripsikan *Chinese Belt dan Road Initiative* (BRI) dan juga dikenal sebagai One Belt and One Road (OBOR) yang merupakan sebuah inisiatif berpolitik Tiongkok di dunia internasional. Parker dan Chefitz menganalisis bahwa *Debt-book Diplomacy* yang dilakukan Tiongkok berupa peristiwa dan statistik terkini dari tindakan ekonomi politik Tiongkok dalam kancah global. Inti dari diplomasi ini yakni dengan menawarkan beberapa pinjaman kepada negara-negara yang bersangkutan yang digunakan untuk membangun jalan, infrastruktur dan mempercepat pembangunan ekonomi pada daerah-daerah yang berkembang.<sup>1</sup>

*Debt-book Diplomacy* yang dilakukan oleh Tiongkok nantinya akan berakibat pada adanya *Debt-trap Diplomacy*. *Debt-book Diplomacy* ini sangat berkaitan dengan munculnya pola perpolitikan Tiongkok di tingkat internasional, pada saat semakin maraknya investasi yang dilakukan oleh Tiongkok di kawasan

---

<sup>1</sup> Nathanael T. Niambi. "China in Africa: Debtbook Diplomacy?". 2019. Scientific Research Publishing. Hal. 222-223. Diakses dari [https://www.scirp.org/pdf/OJPS\\_2019012216144063.pdf](https://www.scirp.org/pdf/OJPS_2019012216144063.pdf)

Afrika.<sup>2</sup> Tentu, hal ini sangat berkaitan guna melancarkan konsep *One Belt One Road* (OBOR) Tiongkok.

Konsep *One Belt One Road* (OBOR) ini merupakan inisiatif Tiongkok yang dicetuskan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Inti dari inisiatif ini adalah menghubungkan semua orang di seluruh dunia yang berdasarkan dari dua program utama yakni, ekonomi jalur sutra dan jalur maritim abad 21.<sup>3</sup> Dua program utama ini hampir mengelilingi seluruh daratan dan perairan di muka bumi. Sabuk ekonomi jalur sutra menghubungkan tiga rute utama, yakni Cina, Eropa, Teluk Persia, Mediterania, dan Samudera Hindia, serta seluruh saluran perairan di negara anggota yang menjadi inisiatif OBOR merupakan bagian dari program jalur maritim abad 21.<sup>4</sup> Jaringan OBOR mengkombinasikan relasi dengan menggunakan jalur maritim. Sebab, jalur maritim adalah jalur yang sangat strategis bagi perekonomian dan sistem pertahanan.

Inisiatif OBOR mempunyai jaringan yang sangat luas, yakni hampir 2/3 populasi global dan 3/4 sumber energi di dunia. Dilihat dari inisiatif OBOR ini, sangat terlihat bagaimana keinginan Tiongkok untuk mendapat tempat secara global. Inisiatif OBOR sendiri digambarkan guna membentuk kembali tatanan politik dan ekonomi Asia dengan mengembangkan beberapa jaringan perusahaan, budaya, politik, dan perdagangan, walaupun banyak peneliti berpikir bahwa

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> M.M. Du. "China's 'One Belt, One Road' Initiative: Context, focus, Institutions, and Implications. 2013. *The Chinese Global Governance*, 2. Hal.31. Diakses dari <https://doi.org/10.1163/23525207-12340014>

<sup>4</sup> M.C. Van Hout dan T. Bingham. "Surfing the Silk Road". 2013. A Study of Users' experiences. *International Journal of Drug Policy*, 24, 524-529. Diakses dari <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2013.08.011>

OBOR adalah suatu inisiatif untuk menciptakan pasar global yang lancar bagi Tiongkok.<sup>5</sup> Salah satu cara untuk menciptakan pasar global yang lancar bagi Tiongkok adalah dengan cara *Debt-book Diplomacy* pada negara-negara yang membutuhkan aliran dana untuk membangun negaranya.

Gambar 1.1 Peta yang menunjukkan area dalam inisiatif OBOR



Sumber: Orissapost<sup>6</sup>

Dilihat dari gambar peta yang menunjukkan area di bawah inisiatif OBOR, Sri Lanka merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam area inisiatif OBOR. Masuknya Sri Lanka dalam inisiatif OBOR tidak lepas dari wilayah Sri Lanka yang strategis. Selama berabad-abad Sri Lanka sudah terkenal sebagai salah satu jalur sutra yang strategis, yang menghubungkan antara Eropa dan Kekaisaran Cina. Setelah jatuhnya kekaisaran Mongolia pada abad ke-14,

---

<sup>5</sup> J.B. Sheu & Kundu, T. "Forecasting Time-Varying Logistics Distribution Flows in the One Belt-One Road Strategic Context". 2017. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, in Press. Diakses dari <https://doi.org/10.1016/j.tre.2017.03.003>

<sup>6</sup> Orissapost. "Russia Wants India to Join OBOR Initiative. 2017. Diakses dari <http://www.orissapost.com/russia-wants-india-to-join-obor-initiative/>

Kekaisaran Cina menguasai jalur sutra yang digunakan dalam perdagangan lewat jalur maritim, Sri Lanka merupakan salah satu wilayah yang menjadi rute dari perdagangan Kekaisaran Cina pada saat itu.<sup>7</sup>

Hal ini yang membuat Sri Lanka menjadi salah satu wilayah yang sangat penting bagi inisiatif OBOR. Inisiatif OBOR yang berusaha untuk mengulang kembali kejayaan Kekaisaran Cina yang berdagang lewat jalur sutra dan maritim. Keberadaan Sri Lanka yang sejak dahulu menjadi penghubung jalur antara Cina dan Eropa berusaha diulang kembali. Hal ini yang menyebabkan Sri Lanka masuk dalam rencana inisiatif OBOR dan mempunyai peran penting di dalamnya.

Sri Lanka, adalah negara dengan kekuatan ekonomi yang tergolong rendah. Sri Lanka memiliki skor kebebasan ekonomi ke-115 di dunia dalam Indeks 2019, turun 1,4 poin dari tahun sebelumnya.<sup>8</sup> Penurunan ini dipicu dari rendahnya efektivitas hukum dan peradilan yang mengakibatkan kesehatan fiskal tidak meningkat. Sebab, kesehatan fiskal merupakan komponen penting dalam meningkatkan kebebasan ekonomi. Skor kebebasan ekonomi Sri Lanka secara keseluruhan di bawah rata-rata kawasan regional dan global.

---

<sup>7</sup> Janaka Wijayasiri & Nuwanthi Senaratne. *“China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Sri Lanka”*. 2018. Universidad Nacional Autonoma de Mexico-Instituto de Investigaciones Juridicas Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Economico, A. C. Hal, 376-377. Diakses dari <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5550/19.pdf>

<sup>8</sup> Heritage.org. *“Sri Lanka: 2019 Index of Economic Freedom”*. 2019. Diakses dari <https://www.heritage.org/index/country/srilanka>

Gambar 1.2 Grafik kebebasan ekonomi Sri Lanka 2015-2019



Sumber: Heritage.org (2019)<sup>9</sup>

Tiongkok dan Sri Lanka mempunyai jalinan kerjasama investasi yang cukup erat. Dari tahun 2011-2015 Tiongkok mempunyai nilai investasi yang sangat besar terhadap perekonomian Sri Lanka. Pada tahun 2014 saja, Tiongkok mempunyai sekitar 25% dari total *Foreign Direct Investment* (FDI) di Sri Lanka.<sup>10</sup> Jika ditotal dari tahun 2011-2015 Tiongkok mempunyai bagian dalam 15,5 persen total FDI Sri Lanka dengan total nilai 989,6 juta dollar, dengan objek investasi utamanya yakni, logistik, transportasi, dan *real estate*.<sup>11</sup> Objek-objek yang dari investasi Tiongkok di Sri Lanka merupakan objek yang sangat vital dan berpengaruh pada kondisi perekonomian.

---

<sup>9</sup> Heritage.org. "Sri Lanka: Economic Freedom Score". 2019.  
<https://www.heritage.org/index/pdf/2019/countries/srilanka.pdf>

<sup>10</sup> *Op.Cit.* Janaka Wijayasiri & Nuwanthi Senaratne. Hal. 382

<sup>11</sup> *Ibid*

Gambar 1.3 Nilai investasi negara-negara di Sri Lanka tahun 2011-2015

	<i>US\$ Million</i>	<i>% of Total</i>
China	989.6	15.5
Hong Kong	798.7	12.5
Mauritius	576.6	9.1
UK	571.7	9.0
India	477.2	7.5
UAE	426.8	6.7
Malaysia	415.3	6.5
Netherlands	414.0	6.5
Singapore	385.7	6.0
USA	218.9	3.4
British Virgin Islands	137.0	2.1
Luxembourg	124.7	2.0
Japan	114.0	1.8
Canada	113.4	1.8
Australia	95.2	1.5
Switzerland	61.1	1.0
Total FDI	6381.5	100.0

Sumber: Wijayasiri, Janaka & Nuwanthi Senarathe. 2018. “*China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Sri Lanka*”.<sup>12</sup>

Hubungan antara Tiongkok dan Sri Lanka setelah adanya inisiatif *One Belt One Road* (OBOR) lebih kepada kerjasama investasi kepada pembangunan berbagai sarana infrastruktur publik. Misalnya, *Colombo Port City, Hambantota Port & Adjoining Industrial Estate, Colombo Port Expansion, Mattala Rajapaksa International Airport*, dan masih banyak lagi program-program yang dijalin antara Pemerintah Tiongkok dengan Sri Lanka setelah adanya inisiatif OBOR.<sup>13</sup> Program-program yang digagas bersifat sangat strategis, seperti pembangunan kawasan ekonomi lewat pelabuhan dan pengembangan bandara. Tetapi, dari

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal. 387-388.

banyaknya pembangunan sarana infrastruktur publik, yang sangat disorot adalah pada pembangunan Pelabuhan Hambantota (*Hambantota Port*). Sebab, selesai pembangunan dan jatuh tempo akan hutangnya, Sri Lanka tidak bisa melunasi hutang pinjaman atas pembangunan Pelabuhan Hambantota tersebut. Pada akhirnya dengan terpaksa, Sri Lanka menyerahkan Pelabuhan Hambantota dalam kontrol Cina untuk melunasi hutang pinjamannya. Pelabuhan Hambantota disewa oleh Perusahaan *China Merchant Port Holdings Limited* (CM Port) dengan harga 1,12 miliar dolar dengan jangka waktu yang cukup lama yakni 99 tahun, dimulai pada tahun 2017.<sup>14</sup> Dengan adanya penyewaan pelabuhan Hambantota ini, secara tidak langsung menyebabkan Sri Lanka terjebak dalam hutang pinjaman yang sangat besar dan membebani kondisi ekonomi dari Sri Lanka sendiri.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penulis menjelaskan latar belakang masalah yang berisi penjelasan *Debt-book Diplomacy*, Praktik *Debt-book Diplomacy* Tiongkok di Sri Lanka serta hubungannya dengan inisiatif *One Belt One Road* (OBOR), dan kondisi internal ekonomi Sri Lanka pada tahun 2017-2019. Dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang akan dijelaskan, adalah **“Bagaimana Pengaruh *Debt-book Diplomacy* Tiongkok Terhadap Situasi Ekonomi dan Politik Sri Lanka Tahun 2017-2019 ?”**.

---

<sup>14</sup> Umesh Moramudali. “*Is Sri Lanka Really a Victim of China’s ‘Debt Trap’?*”. 2019. Sri Lanka’s Debt Crisis and Chinese Loans-Separating Myth from Reality. *The Diplomat*. Diakses dari <https://thediplomat.com/2019/05/is-sri-lanka-really-a-victim-of-chinas-debt-trap/>

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari adanya *debt-book diplomacy* dari Tiongkok terhadap situasi ekonomi politik Sri Lanka tahun 2017-2019.

### **1.4 Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1 Landasan Teori**

##### **1.4.1.1 *Debt-Trap Diplomacy***

*Debt-trap diplomacy* merupakan konsep yang pertama kali dikemukakan oleh akademisi India, yakni Brahma Chellaney yang menjelaskan pada strategi yang disengaja, saat satu negara secara berlebihan meminjamkan dana ke negara lain dengan tujuan mendapatkan konsesi ekonomi atau politik dari kemungkinan peminjam gagal bayar.<sup>15</sup> Chellaney, mengutarakan gagasan *debt-trap diplomacy* melihat manuver investasi Tiongkok di wilayah Afrika. Manuver investasi yang dilakukan Tiongkok dinilai sebagai suatu strategi yang mencerminkan *debt-trap diplomacy*.

Negara-negara yang menjadi sasaran *debt-trap diplomacy* merupakan negara-negara yang secara finansial ekonomi tidak mempunyai pondasi yang cukup kuat, sehingga diprediksi tidak akan bisa mengembalikan pinjaman yang diberikan dalam tempo yang ditentukan.<sup>16</sup> Negara-negara dengan finansial yang tidak cukup

---

<sup>15</sup> Patrick Maluki & Nyongesa Lemmy. "Is China's Development Diplomacy in Horn of Africa Transforming into Debt-Trap Diplomacy? An Evaluation". 2019. The Horn Bulletin. Volume II, Issue I. Hal 9. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/334048231>

<sup>16</sup> Ibid. Hal. 11.



kuat ini, menunjukkan bahwa di dalam internal ekonomi negaranya mempunyai nilai-nilai yang berpotensi sebagai sasaran, seperti upah buruh yang murah serta rendahnya tingkat kompetisi pasar di dalamnya. Dapat disimpulkan, bahwa negara-negara yang perekonomiannya tidak cukup berkembang menjadi sasaran dari *debt-trap diplomacy* ini.

#### **1.4.1.2 Sovereign Debt Crisis**

*Sovereign Debt* menjadi awal terjadinya *sovereign debt crisis*. Menurut Koba, *sovereign debt* adalah suatu hutang yang dijamin oleh suatu pemerintah tertentu atau juga disebut sebagai utang luar negeri.<sup>17</sup> Hutang ini terjadi karena adanya beberapa proses dari suatu pemerintahan untuk mendapatkan uang. Untuk mendapatkan uang, pemerintah akan menerbitkan suatu surat obligasi dalam mata uang asing yang bukan milik pemerintah dan menjual obligasi itu kepada investor asing.<sup>18</sup> Ini lah yang membuat *sovereign debt* sebagai hutang eksternal karena menargetkan pembeli dari investor luar negeri dengan mata uang yang dimiliki investor biasanya kuat, yang disebabkan nilainya lebih tinggi dari mata uang negara lainnya.

Dalam buku *Handbook of Safeguarding Global Financial Stability: Chapter 31-Varieties of European Crisis*, Willet dan Wihlborg menjelaskan bahwa *sovereign debt crisis* terjadi ketika kombinasi dari tingkat hutang pemerintah dan prospek defisit fiskal yang terus menerus saling berpasangan dan akhirnya menimbulkan suatu keraguan untuk melunasi semua hutang dengan nilai

---

<sup>17</sup> Mark Koba. "Sovereign Debt: CNBC Explains". 2011. CNBC. Diakses dari <https://www.cnbc.com/id/44771099>

<sup>18</sup> Ibid.

nominal.<sup>19</sup> Bisa dikatakan, keraguan akan negara tidak akan bisa melunasi hutang yang jatuh tempo, dan ditambah prospek fiskal yang mengalami defisit. Selain itu, *sovereign debt crisis* terjadi karena negara mengabaikan tanda indikator-indikator yang memicu terjadinya krisis karena alasan politik.<sup>20</sup> Tanda indikator pertama, adalah saat negara tidak dapat mendapatkan suku bunga yang rendah dari negara pemberi pinjaman, ditambah dengan kekhawatiran dan keraguan negara akan mengalami gagal bayar, investor menjadi khawatir.<sup>21</sup> Ketika investor mulai khawatir mereka membutuhkan hasil bayar hutang yang lebih tinggi untuk mengimbangi resiko yang mereka alami saat negara mengalami gagal bayar, dengan semakin tinggi hasil yang investor inginkan, maka beban negara yang berhutang menjadi lebih berat.<sup>22</sup>

#### **1.4.1.3 Pengaruh *Sovereign Debt Crisis* Terhadap Situasi Ekonomi dan Politik Suatu Negara**

Salah satu wilayah yang pernah mengalami *sovereign debt crisis* secara masif dan tinggi adalah negara dikawasan Eropa pada kisaran tahun 2008-2009. *Sovereign debt crisis* menghambat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang meningkat, terutama dikawasan Euro.<sup>23</sup> Selain itu, terdapat juga negara-negara yang mengalami resesi yang mendalam seperti Italia, Spanyol, dan

---

<sup>19</sup> T. D. Willet & C. Wihlborg. "*Debt Crisis*". Varieties of European Crisis: Sovereign Debt Crisis. 2013. Handbook of Safeguarding Global Financial Stability. Diakses dari <https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/debt-crisis>

<sup>20</sup> Kimberly Amadeo. "*Sovereign Debt Crisis with Example*". 2019. The Balance. Diakses dari <https://www.thebalance.com/what-is-a-sovereign-debt-crisis-with-examples-3305748>

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO). "*Slowdown in Economic Growth*". 2020. Diakses dari <https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/seco/nsb-news.msg-id-45983.html>

beberapa negara lain, serta sehubungan dengan melemahnya dukungan yang diberikan oleh perdagangan global membuat terjadinya perlambatan di banyak negara diluar eropa, terutama di negara-negara Asia.<sup>24</sup>

Dari krisis hutang yang dialami Eropa, hanya menyebabkan satu dampak utama dalam perekonomian, yakni adanya penurunan dalam perekonomian, baik itu resesi atau perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang melambat karena krisis hutang ini disebabkan, karena tingkat hutang yang dimiliki pemerintah semakin tinggi dan ada keraguan atas ketidak mampuan pemerintah untuk melunasi hutang tersebut secara nominal.<sup>25</sup> Hal ini menyebabkan, resiko untuk melakukan suatu kebijakan ekonomi akan lebih besar, dengan dipicu oleh semakin besarnya defisit dan tingkat hutang negara, sehingga terjadi suatu pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Biasanya negara yang mengalami krisis hutang, memiliki suku bunga yang tinggi, serta menyebabkan beban *leverage* suatu perusahaan dan lembaga keuangan menjadi lebih besar.<sup>26</sup> Selain itu, krisis hutang menyebabkan situasi fiskal tidak berkelanjutan dan opini pasar menjadi berubah-ubah secara cepat dengan melihat resiko kecil menjadi suatu hal besar yang dikhawatirkan.

Selain itu, dampak dari krisis hutang dapat mempengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Briscoe menyebutkan 4 dampak dari krisis hutang terhadap kondisi sosial politik suatu negara yakni, (1) krisis sosial ekonomi dan pemiskinan

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Op.cit. T. D. Willet & C. Wihlborg. "*Debt Crisis*". Varieties of European Crisis: Sovereign Debt Crisis. 2013.

<sup>26</sup> Ibid.

masal; (2) *democratic pressure*; (3) relokasi otoritas publik; (4) dan intervensi dari luar.<sup>27</sup> Tetapi, keempat syarat tidak semua terjadi dalam suatu negara, tergantung kondisi negara tersebut, serta penyebab terjadinya krisis. Briscoe, menyebutkan contoh terjadi perbedaan antara krisis hutang yang terjadi di Zambia dan Indonesia, mengenai dampak yang ke 2, yakni *democratic pressure*. Untuk Indonesia, setelah krisis tahun 1998, muncul partai-partai politik baru dan sebuah sistem yang lebih dipegang oleh masyarakat sipil, tetapi malah sistem ini kembali diperebutkan oleh elit-elit yang berkuasa sebelum terjadinya krisis.<sup>28</sup> Sedangkan di Zambia, krisis yang membuat demokrasi di Zambia mengalami penurunan di awal tahun 1990-an berakhir dengan pembangunan kembali elit politik baru, yang berusaha untuk membatasi partisipasi demokrasi dan keterbukaan dengan tujuan untuk memprovokasi cepat eksodus donor asing.<sup>29</sup>

---

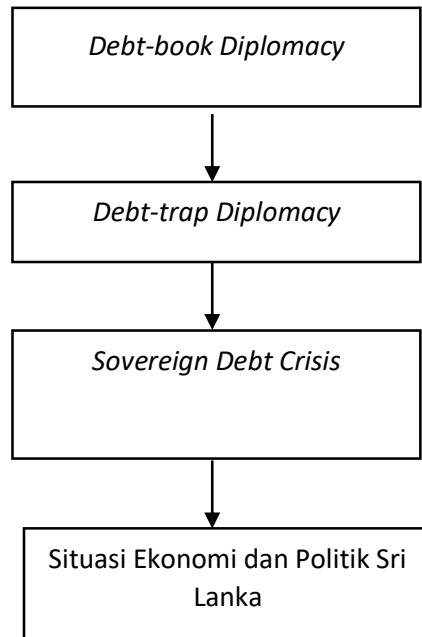
<sup>27</sup> Ivan Briscoe. "*Debt Crises, Political Change, and The State in The Developing World*". 2006. Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Hal. 22-23. Diakses dari <https://www.ucm.es/data/cont/docs/430-2013-10-27-2006%20WP%2001-06.pdf>

<sup>28</sup> Ibid. Hal. 22-23.

<sup>29</sup> Ibid.

## 1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.4 Sintesa Pemikiran



*Debt-trap diplomacy* dan *Sovereign Debt Crisis* dapat menjadi alat untuk menjelaskan pengaruh *debt-book diplomacy* Tiongkok terhadap situasi ekonomi politik Sri Lanka tahun 2017-2019. *Debt-trap diplomacy* merupakan salah satu akibat buruk setelah adanya praktik *debt-book diplomacy*. Diplomasi buku hutang berubah menjadi jebakan hutang bagi Sri Lanka. Dengan jebakan hutang yang semakin serius dan terlalu lama dan tidak bisa untuk dikembalikan, maka akan menyebabkan adanya *sovereign debt crisis* yang akan berdampak pada kondisi ekonomi politik Sri Lanka yakni adanya perlambatan ekonomi yang dipicu oleh krisis hutang. Krisis hutang ini menyebabkan serangkaian perubahan kondisi

sosial politik, baik itu dari sisi pemerintahan atau dari situasi di politik di masyarakat.

## 1.6 Argumen Utama

Sri Lanka menjadi salah satu negara yang menjadi target dari inisiatif *One Belt One Road* (OBOR) dari Tiongkok. Inisiatif OBOR dari Tiongkok salah satunya adalah yang disebut sebagai *debt-book diplomacy*, yakni diplomasi dengan menggunakan buku hutang atau pinjaman. Tetapi, Sri Lanka menjadi terjebak atas hutang dan pinjaman-pinjaman yang dilakukannya, salah satunya adalah kepada Tiongkok. Hal ini menjadikan *debt-book diplomacy* ini sebagai *debt-trap diplomacy*, yang memang dilakukan sengaja oleh Tiongkok agar Sri Lanka menjadi terjebak, dalam kondisi *sovereign debt crisis*, atau yang disebut sebagai krisis hutang bagi negara. Sri Lanka yang mengalami krisis hutang pada akhirnya menyerahkan Pelabuhan Hambantota pada perusahaan Tiongkok sebagai imbas dari kegagalan mengembalikan dana pinjaman. Dampak dari krisis utang ini, adalah Sri Lanka akan memangkas sejumlah pengeluaran, dan menaikkan pajak. Dampak utama dari *sovereign debt crisis*, yakni perekonomian Sri Lanka mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh tingkat hutang yang tinggi dan proyeksi dana nominal untuk melunasi hutang tidak mencukupi membuat seluruh aspek ekonomi menjadi tidak kondusif. Hal ini menyebabkan, rencana menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi harus ditunda untuk mengurangi dampak dari krisis hutang, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Ditambah dengan situasi fiskal yang tidak kondusif membuat pasar bergejolak dan merespon seluruh isu-isu kecil menjadi suatu

kekhawatiran yang besar. Selanjutnya, Dampak dari krisis hutang yang terjadi dapat mengakibatkan pengaruh dalam situasi politik di Sri Lanka yang akan dicocokkan dengan Jurnal Ivan Briscoe, yang berjudul “*Debt crises, political change, and the state in the developing world*”, tahun 2006.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penulis melakukan penelitian terhadap seberapa besar pengaruh dari suatu kebijakan dari negara lain terhadap negara lainnya. Maka dari itu penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif agar penulis dapat menjelaskan dan mendeskripsikan gambaran lengkap dari sebuah fenomena. Penulis juga berusaha untuk menjelaskan data-data yang ada secara jelas dan objektif.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Pengambilan waktu dalam jangkauan penelitian oleh penulis yakni antara tahun 2017-2019. Hal ini dikarenakan salah satu fenomena yang ramai diperbincangkan mengenai hubungan antara Tiongkok dan Sri Lanka adalah disewanya Pelabuhan Hambantota oleh Tiongkok pada Tahun 2017, sehingga untuk menemukan jawaban penelitian pada tahun 2017 bisa menjadi titik awal untuk meneliti pengaruh *debt-book diplomacy* Tiongkok pada situasi ekonomi politik Sri Lanka. Penulis membatasi hanya sampai tahun 2019, karena pada saat akhir tahun 2019, muncul Presiden baru bagi Sri Lanka, yakni Gotabaya Rajapaksa. Penulis menganggap bahwa munculnya pemimpin baru maka akan

menciptakan kebijakan baru. Maka penulis hanya membatasi pada tahun 2019 saja.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis dalam mengumpulkan data akan menggunakan metode melalui tinjauan pustaka. Sumber—sumber dari data sekunder, seperti artikel online, jurnal online dan buku menjadi sumber data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan metode tinjauan pustaka dirasa lebih efektif dan tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data yang didapatkan dari sumber data sekunder, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif akan membantu penulis dalam memahami data-data dalam penelitian di bidang sosial politik yang cenderung bersifat kompleks dan tidak dapat diukur dengan pasti. Selain itu, metode kualitatif membantu penulis bisa lebih mengeksplor dan mengembangkan argumen secara luas serta menjelaskan berbagai relasi antara data-data yang tersedia.

### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian kali ini, penulis melakukan pembagian sistematika penulisan ke dalam 4 bab, yang terdiri dari substansi-substansi berikut :

BAB I. Dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rumusan masalah dan



tujuan penelitian dari penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan mengenai kerangka pemikiran yang disertai dengan sintesa pemikiran, argumen utama penulis, dan metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam membuat penelitian ini.

BAB II. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bahwa praktek *debt-book diplomacy* dari Tiongkok dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dari Sri Lanka, yakni dengan adanya perlambatan ekonomi bagi Sri Lanka. Perlambatan ekonomi ini dipicu karena adanya *sovereign debt crisis* yang dialami Sri Lanka hingga mengakibatkan adanya perlambatan ekonomi bagi Sri Lanka.

BAB III. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bahwa dari perlambatan ekonomi akibat *sovereign debt crisis* dapat berpengaruh buruk bagi kondisi sosial politik Sri Lanka. Pengaruh dari krisis hutang terhadap kondisi sosial politik yang terjadi di Sri Lanka ini akan penulis cocokkan dengan panduan dari Jurnal Ivan Briscoe, yang berjudul “*Debt crises, political change, and the state in the developing world*”, tahun 2006.

BAB IV. Dalam bab ini berisi analisis penulis yang dijelaskan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis.